

**PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 untuk periode Triwulan II. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan II ini memuat segala transaksi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran disajikan sebagai output Laporan Pencapaian Target Kinerja pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA. 2019.

Akhir kata, kami sadari bahwa Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan II ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Serang, Juni 2019

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 19610323 198903 1009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten tiap triwulannya pada Tahun Anggaran 2019;
2. Memperbandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan;
2. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per triwulan di Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Provinsi Banten diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka tersebar luasnya informasi pengembangan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Inspektorat Provinsi Banten mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd

Indikator pencapaian keberhasilan (Target Kinerja setelah perubahan), secara garis besar program Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 18 Laporan)
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 4 Dokumen)

2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, 14 bulan)
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan)
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan; Laporan Dokumen Perpajakan, 12 Laporan)

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pengadaan Pakaian Dinas, 1 Kegiatan)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur; Diklat Fungsional Teknis Substantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan, 3 Kegiatan)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 1 kegiatan)
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tersedianya bahan/alat perlengkapan kantor, 1 kegiatan)
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, 2 Kegiatan)
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah, 12 bulan)
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 12 bulan)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 2 kegiatan)
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor, 3 kegiatan)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, 1 kegiatan)
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya jasa Pelayanan umum, 1 kegiatan)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan, 6 Unit)
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional, 23 Unit)
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer), 146 unit)
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 4 kegiatan)

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Kinerja Pada Program & Keg Prov Banten (Irbn 1), 1 kegiatan); Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kab Kota TA 2021 (Irbn IV), 4 kegiatan);
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK,3 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional Irbn I, 8 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional, Probitiy dan Monev BMD (Irbn 2), 10 Kegiatan; Terlaksananya Audit, Reviu, Probitiy dan Evaluasi, 4 Kegiatan);
- c. Reviu Laporan Kinerja (Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Prov Banten, 1 Kegiatan; Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irbn IV), 6 Kegiatan);
- d. Reviu Laporan Keuangan (Terlaksananya Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II), 3 Kegiatan; Terlaksananya Reviu & Monev IRBAN III, 6 Kegiatan; Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I), 3 Kegiatan;
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring & TL IRBAN II 3 Kegiatan; Monitoring & TL IRBAN III 1 Kegiatan; Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT, 4 Kegiatan).

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 1 kegiatan);
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Irbn I), 1 Kegiatan).

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas

Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Terlaksananya (Rakorwasda, Rakorwasnas, Rapim Evaluasi, Saresehan, DOPT&PKPT, Pemutakhiran Data Itjen), 6 Kegiatan; Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I dan II Inspektorat Provinsi, 2 Laporan; Tersusunnya Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan, 4 Dokumen).

2. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Terlaksananya Kegiatan SATGAS AKD, 3 Kegiatan; Terlaksananya Keg Peningkatan

Kapabilitas SPIP (Irban III), 2 Kegiatan; Terlaksananya Monev, dan Workshop PPUPD(Irban IV), 9 Kegiatan; Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I), 4 Kegiatan)

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 1 Kegiatan);
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Terlaksananya HAKI 2021, 1 Kegiatan; Terlaksananya Keg.Tim Saber Pungli Prov Banten,1 Kegiatan; Terlaksananya Keg UPG Prov Banten, 1 Kegiatan; Tersusunnya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten, 1 Dokumen);
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten, 1 Kegiatan).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Provinsi Banten

Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp39.853.323.641,00,- dari pagu anggaran sebesar Rp46.000.000.000,00,- atau (86,64%), sisa anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp6.146.676.359,00,-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3x100
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46,000,000,000.00	39,853,323,641.00	(6,146,676,359.00)	86.64
511	Belanja Pegawai	46,000,000,000.00	39,853,323,641.00	(6,146,676,359.00)	86.64
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	9,274,160,598.00	7,039,532,292.00	(2,234,628,306.00)	75.90
5110101	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,474,941,800.00	5,096,503,712.00	(1,378,438,088.00)	78.71
5110102	Belanja Tunjangan Keluarga	927,918,608.00	577,018,578.00	(350,900,030.00)	62.18
5110103	Belanja Tunjangan Jabatan	156,380,000.00	133,340,000.00	(23,040,000.00)	85.27
5110104	Belanja Tunjangan Fungsional	810,060,000.00	710,760,000.00	(99,300,000.00)	87.74
5110105	Belanja Tunjangan Umum	58,610,000.00	23,475,000.00	(35,135,000.00)	40.05
5110106	Belanja Tunjangan Beras	477,384,800.00	306,264,180.00	(171,120,620.00)	64.15
5110107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6,700,000.00	4,631,167.00	(2,068,833.00)	69.12
5110108	Belanja Pembulatan Gaji	165,390.00	82,304.00	(83,086.00)	49.76
5110123	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	300,000,000.00	146,178,331.00	(153,821,669.00)	48.73
5110124	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	62,000,000.00	41,279,020.00	(20,720,980.00)	66.58
51102	Tambahan Penghasilan PNS	36,725,839,402.00	32,813,791,349.00	(3,912,048,053.00)	89.35
5110201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31,674,694,806.00	29,215,041,349.00	(2,459,653,457.00)	92.23
5110204	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	19,200,000.00	-	(19,200,000.00)	0.00
5110206	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5,031,944,596.00	3,598,750,000.00	(1,433,194,596.00)	71.52

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terealisasi sebesar sebesar Rp23.882.248.547,00,- atau sebesar (81.00%) dari pagu anggaran sebesar Rp29.482.507.000,00,- sisa anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp5.600.258.453,00,-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Belanja Langsung

No	Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3x100
5	BELANJA DAERAH				
52	BELANJA LANGSUNG	29,482,507,000.00	23,882,248,547.00	(5,600,258,453.00)	81.00
521	Belanja Pegawai	3,473,850,000.00	3,046,250,000.00	(427,600,000.00)	87.69
52101	Honorarium PNS	-	-	-	0.00
5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	0.00
52102	Honorarium Non PNS	3,473,850,000.00	3,046,250,000.00	(427,600,000.00)	87.69
5210203	Honorarium Tim Non PNS	3,473,850,000.00	3,046,250,000.00	(427,600,000.00)	87.69
522	Belanja Barang dan Jasa	21,428,390,000.00	16,445,559,834.00	(4,982,830,166.00)	76.75
52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1,287,907,200.00	1,101,001,200.00	(186,906,000.00)	85.49
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	472,037,350.00	375,133,000.00	(96,904,350.00)	79.47
5220103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	101,440,850.00	97,600,000.00	(3,840,850.00)	96.21
5220104	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,500,000.00	1,950,000.00	(2,550,000.00)	43.33
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	370,332,000.00	297,238,200.00	(73,093,800.00)	80.26
5220107	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5,212,000.00	-	(5,212,000.00)	0.00
5220108	Belanja Pengisian Gas	3,960,000.00	2,500,000.00	(1,460,000.00)	63.13
5220119	Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00
5220122	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	282,150,000.00	278,305,000.00	(3,845,000.00)	98.64
5220126	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	26,175,000.00	26,175,000.00	-	100.00
5220127	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Olah raga	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00
52203	Belanja Jasa Kantor	897,980,000.00	647,843,265.00	(250,136,735.00)	72.14
5220301	Belanja Telepon/Faksimili/Internet	48,000,000.00	1,480,498.00	(46,519,502.00)	3.08
5220303	Belanja Listrik	600,000,000.00	410,755,267.00	(189,244,733.00)	68.46
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	26,280,000.00	26,280,000.00	-	100.00
5220312	Belanja Jasa Kebersihan	199,700,000.00	196,783,000.00	(2,917,000.00)	98.54
5220314	Belanja Jasa TV Cable	24,000,000.00	12,544,500.00	(11,455,500.00)	52.27
52204	Belanja Premi Asuransi	30,000,000.00	3,433,830.00	(26,566,170.00)	11.45

5220401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	30,000,000.00	3,433,830.00	(26,566,170.00)	11.45
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	733,120,000.00	344,345,411.00	(388,774,589.00)	46.97
5220501	Belanja Jasa Service	733,120,000.00	344,345,411.00	(388,774,589.00)	46.97
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	665,264,100.00	629,477,800.00	(35,786,300.00)	94.62
5220601	Belanja Cetak	558,301,300.00	547,927,000.00	(10,374,300.00)	98.14
5220602	Belanja Penggandaan	106,962,800.00	81,550,800.00	(25,412,000.00)	76.24
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	86,881,000.00	32,700,000.00	(54,181,000.00)	37.64
5220702	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52,500,000.00	21,000,000.00	(31,500,000.00)	40.00
5220705	Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan	19,581,000.00	-	(19,581,000.00)	0.00
5220706	Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga	14,800,000.00	11,700,000.00	(3,100,000.00)	79.05
52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48,000,000.00	48,000,000.00	-	100.00
5220801	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48,000,000.00	48,000,000.00	-	100.00
52212	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105,200,000.00	98,120,000.00	(7,080,000.00)	93.27
5221205	Belanja Sewa Tenda	91,200,000.00	85,120,000.00	(6,080,000.00)	93.33
5221207	Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)	14,000,000.00	13,000,000.00	(1,000,000.00)	92.86
52214	Belanja Makanan dan Minuman	1,535,978,000.00	1,251,304,000.00	(284,674,000.00)	81.47
5221402	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,103,952,000.00	896,680,000.00	(207,272,000.00)	81.22
5221404	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	432,026,000.00	354,624,000.00	(77,402,000.00)	82.08
52215	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	64,300,000.00	63,649,000.00	(651,000.00)	98.99
5221502	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	64,300,000.00	63,649,000.00	(651,000.00)	98.99
52216	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	155,585,000.00	154,806,000.00	(779,000.00)	99.50
5221601	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	155,585,000.00	154,806,000.00	(779,000.00)	99.50
52217	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	103,050,000.00	101,510,000.00	(1,540,000.00)	98.51
5221703	Belanja Pakaian Batik Tradisional	47,050,000.00	47,050,000.00	-	100.00
5221704	Belanja Pakaian Olahraga	56,000,000.00	54,460,000.00	(1,540,000.00)	97.25
52218	Belanja Perjalanan Dinas	10,233,854,100.00	7,383,428,083.00	(2,850,426,017.00)	72.15
5221801	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,306,346,000.00	5,696,042,800.00	(2,610,303,200.00)	68.57
5221802	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,927,508,100.00	1,687,385,283.00	(240,122,817.00)	87.54
52220	Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1,168,000,000.00	825,710,845.00	(342,289,155.00)	70.69
5222001	Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	60,000,000.00	24,005,000.00	(35,995,000.00)	40.01
5222008	Belanja Pengiriman Diklat Fungsional	1,108,000,000.00	801,705,845.00	(306,294,155.00)	72.36
52223	Belanja Pemeliharaan	1,667,558,200.00	1,637,529,000.00	(30,029,200.00)	98.20
5222317	Belanja Pemeliharaan Komputer	75,450,000.00	75,315,000.00	(135,000.00)	99.82
5222319	Belanja Pemeliharaan Alat Studio	20,000,000.00	19,000,000.00	(1,000,000.00)	95.00

5222328	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	56,500,000.00	49,670,000.00	(6,830,000.00)	87.91
5222331	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,515,608,200.00	1,493,544,000.00	(22,064,200.00)	98.54
52224	Belanja Jasa Konsultansi	207,105,000.00	207,105,000.00	-	100.00
5222408	Belanja Jasa Konsultansi Survey	207,105,000.00	207,105,000.00	-	100.00
52229	Uang Saku dan Uang Makan	145,200,000.00	135,700,000.00	(9,500,000.00)	93.46
5222901	Uang Saku	28,200,000.00	22,900,000.00	(5,300,000.00)	81.21
5222904	Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	117,000,000.00	112,800,000.00	(4,200,000.00)	96.41
52231	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	1,384,501,900.00	932,815,900.00	(451,686,000.00)	67.38
5223101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	1,157,000,000.00	865,112,500.00	(291,887,500.00)	74.77
5223102	Belanja Jasa Tenaga Ahli	114,501,900.00	58,203,400.00	(56,298,500.00)	50.83
5223103	Belanja Jasa Pendampingan	113,000,000.00	9,500,000.00	(103,500,000.00)	8.41
52232	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	540,200,000.00	516,600,000.00	(23,600,000.00)	95.63
5223204	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan	517,400,000.00	493,800,000.00	(23,600,000.00)	95.44
5223205	Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis	22,800,000.00	22,800,000.00	-	100.00
52233	Belanja Jasa Kegiatan	15,600,000.00	-	(15,600,000.00)	0.00
5223307	Belanja Jasa Pengujian	15,600,000.00	-	(15,600,000.00)	0.00
5223311	Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	0.00
52235	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	353,105,500.00	330,480,500.00	(22,625,000.00)	93.59
5223501	Belanja Dokumentasi	2,355,500.00	2,155,500.00	(200,000.00)	91.51
5223503	Belanja Promosi dan Publikasi	350,750,000.00	328,325,000.00	(22,425,000.00)	93.61
523	Belanja Modal	4,580,267,000.00	4,390,438,713.00	(189,828,287.00)	95.86
52317	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	390,000,000.00	365,073,563.00	(24,926,437.00)	93.61
5231702	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	390,000,000.00	365,073,563.00	(24,926,437.00)	93.61
52324	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	60,000,000.00	42,181,000.00	(17,819,000.00)	70.30
5232408	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	60,000,000.00	42,181,000.00	(17,819,000.00)	70.30
52327	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Kantor	90,000,000.00	89,935,800.00	(64,200.00)	99.93
5232705	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	90,000,000.00	89,935,800.00	(64,200.00)	99.93
52328	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	752,590,000.00	725,244,250.00	(27,345,750.00)	96.37
5232801	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	638,590,000.00	612,468,000.00	(26,122,000.00)	95.91
5232804	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	39,000,000.00	38,276,250.00	(723,750.00)	98.14
5232805	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	75,000,000.00	74,500,000.00	(500,000.00)	99.33
52329	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1,231,500,000.00	1,151,415,100.00	(80,084,900.00)	93.50

5232905	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1,231,500,000.00	1,151,415,100.00	(80,084,900.00)	93.50
52331	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	866,177,000.00	838,833,000.00	(27,344,000.00)	96.84
5233101	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	866,177,000.00	838,833,000.00	(27,344,000.00)	96.84
52348	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	90,000,000.00	89,000,000.00	(1,000,000.00)	98.89
5234801	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemanan	90,000,000.00	89,000,000.00	(1,000,000.00)	98.89
52349	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	900,000,000.00	890,756,000.00	(9,244,000.00)	98.97
5234901	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	900,000,000.00	890,756,000.00	(9,244,000.00)	98.97
52379	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	200,000,000.00	198,000,000.00	(2,000,000.00)	99.00
5237902	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	200,000,000.00	198,000,000.00	(2,000,000.00)	99.00

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan

Realisasi belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp63.735.572.188,00,- atau (84,44%) dari pagu anggaran sebesar Rp75.482.507.000,00,- dan sisa anggaran sebesar Rp11.746.934.812,00,-. Secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.853.323.641,00,- atau (86,64%) dari pagu anggaran sebesar Rp46.000.000.000,00,-, terbagi atas Belanja Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Gaji dan Tunjangan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.039.532.292,00,- atau (75,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp9.274.160.598,00,-.

Tambahan Penghasilan PNS realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.813.791.349,00,- atau (89,35%) dari pagu anggaran sebesar Rp36.725.839.402,00,-.

Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan tidak terdapat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, karena sudah sesuai dengan jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi Banten.

Namun khusus untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Kondisi Kerja yang tidak terealisasi, hal tersebut disebabkan pegawai yang ada sudah memiliki jabatan lain, sehingga tidak diusulkan untuk pengajuan SK Petugas Arsip.

B. Belanja Langsung:

Realisasi yang terbagi ke dalam kegiatan-kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan

No	Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
	BELANJA DAERAH				
3002.300201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	29,482,507,000.00	23,882,248,547.00	(5,600,258,453.00)	81.00
3002.300201.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	13,696,834,200.00	11,975,538,814.00	(1,721,295,386.00)	87.43
3002.300201.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22,288,000.00	22,288,000.00	-	100.00
3002.300201.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	87,865,000.00	79,182,800.00	(8,682,200.00)	90.12
3002.300201.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	4,580,267,000.00	4,390,438,713.00	(189,828,287.00)	95.86
3002.300201.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2,600,378,200.00	2,178,657,411.00	(421,720,789.00)	83.78
3002.300201.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3,424,845,500.00	2,867,032,295.00	(557,813,205.00)	83.71
3002.300201.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1,623,990,500.00	1,126,821,345.00	(497,169,155.00)	69.39
3002.300201.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	1,200,000,000.00	1,160,909,250.00	(39,090,750.00)	96.74
3002.300201.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	106,500,000.00	104,760,000.00	(1,740,000.00)	98.37
3002.300201.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	50,700,000.00	45,449,000.00	(5,251,000.00)	89.64
3002.300201.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15,785,672,800.00	11,906,709,733.00	(3,878,963,067.00)	75.43
3002.300201.15.001	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,125,293,000.00	5,902,457,200.00	(1,222,835,800.00)	82.84
3002.300201.15.002	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,922,895,800.00	1,380,409,300.00	(542,486,500.00)	71.79
3002.300201.15.003	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2,167,527,300.00	1,296,466,400.00	(871,060,900.00)	59.81
3002.300201.15.004	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2,335,990,000.00	1,487,004,000.00	(848,986,000.00)	63.66
3002.300201.15.005	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan	209,126,500.00	208,226,500.00	(900,000.00)	99.57
3002.300201.15.007	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299,378,000.00	230,511,800.00	(68,866,200.00)	77.00
3002.300201.15.008	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	175,690,000.00	110,522,400.00	(65,167,600.00)	62.91
3002.300201.15.009	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	1,549,772,200.00	1,291,112,133.00	(258,660,067.00)	83.31

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019, secara umum terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2019, sehingga penyerapan realisasi tersebut ada yang masih dibawah target.

Hambatan dan kendala tersebut secara umum adalah:

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Sisa Anggaran Rp497.169.155,00,-, atau terealisasi (69,39%), berasal dari Biaya Pengiriman Diklat Fungsional dan Kursus yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat keterbatasan waktu dengan pelaksanaan pengawasan;
2. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah, sisa anggaran sebesar Rp542.486.500,00,-, atau terealisasi (71,79%), disebabkan oleh Penyerapan anggaran perjalanan dinas yang disesuaikan dengan pelaksanaan pengawasan;
3. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah, sisa anggaran sebesar Rp871.060.900,00,-, atau terealisasi (59,81%), disebabkan oleh Efisiensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk pengawasan;
4. Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah, sisa anggaran sebesar Rp848.986.000,00,-, atau terealisasi (63,66%), disebabkan oleh efisiensi, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kasus dan pengaduan masyarakat, efisiensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
5. Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten, sisa anggaran sebesar Rp68.866.200,00,-, atau terealisasi (77,00%), adalah merupakan efisiensi kontrak pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman rapat.
6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen, sisa anggaran sebesar Rp65.167.600,00,- atau terealisasi (77,00%) adalah merupakan efisiensi Perjalanan Dinas ke luar daerah ke BPK-RI dan Itjen Jakarta, .

BAB V

PENUTUP

Laporan Monev Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Juni 2019

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 19610323-198903 1009